

Keberadaan PUK dan Kesejahteraan Rakyat

Sistem sentralisasi kekuasaan, ekonomi (pasar) yang tidak adil, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pengutamaan ekonomi dalam pembangunan, serta krisis ekonomi 1998 dinilai menjadi penyebab pemiskinan dan kemiskinan Indonesia. Gambaran tersebut terlukis selama negara Indonesia dipimpin rejim Orde Baru yang berakibat tingginya biaya demi stabilitas politik. Negara melihat rakyat sebagai objek, bukan pembayar pajak yang memiliki hak. Mereka menggunakan militer dan birokrasi sebagai penentu hukum dan menolak pluralisme, dan demokrasi. Dalam bidang ekonomi, pasar-bebas berjalan tidak efisien dan tidak adil, karena minimnya regulasi, sehingga ia didominasi konglomerasi dibanding UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disumbang sektor jasa, industri ekspor, dan tenaga kerja murah. Ternyata ekonomi Indonesia rapuh dan tidak mampu menahan goncangan krisis 1997-1998.

Setelah sebelas tahun reformasi, kondisi itu tidak banyak berubah. Penggusuran pedagang kaki lima, meningkatnya anak jalanan dan kriminal, tertutupnya akses masyarakat terhadap informasi “pembangunan”, aksesibilitas pasar yang tidak terjangkau rakyat dan perempuan usaha kecil-mikro (PUK-mikro), termajinalnya masyarakat adat, kelompok perempuan di lingkungannya, ‘hilang’nya akses masyarakat dalam proses produksi serta eksodusnya masyarakat pedesaan ke perkotaan merupakan gambaran penyebab kemiskinan struktural terus dihadapi Indonesia.

Sayangnya program kemiskinan nagara menyimpan kelemahan, diantaranya; *pertama*, pendekatannya tidak membuka peluang aspirasi si miskin. *Kedua*, pendekatan kegiatan penanggulangan kemiskinan bersifat *charity*. *Ketiga*, pendekatan itu tidak memiliki kepekaan terhadap keberagaman konteks wilayah dan sektor. *Keempat*, pendekatannya tidak mampu menyumbang proses demokratisasi karena menghasilkan pola hubungan subordinat, antara ‘pengendali proyek’ yang dianggap “dermawan” dan lapisan miskin sebagai ‘yang dikasihani’ (Kikis, 2003).

Situasi ini memperparah ketidakadilan PUK-mikro dimana ia telah menghadapi ketidakadilan gender yang berakibat pada marginalisasi di sektor; ekonomi, politik dan sosial budaya. Ketidakadilan gender juga mengakibatkan rendahnya akses dan kontrol perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga, masyarakat dan negara. Hal itu disebabkan karena; *pertama*, persepsi masyarakat tentang posisi dan peran perempuan masih diskriminatif. *Kedua*, terbatasnya ketrampilan dan pengetahuan perempuan serta tidak assertif. *Ketiga*, rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat desa hingga nasional. *Keempat*, belum pulihnya organisasi perempuan dari *hegemoni* negara saat orde baru untuk kepentingan politik penguasa. *Kelima*, kebijakan pemerintah (dalam UU perkawinan) dan programnya masih mengukuhkan peran suami sebagai kepala keluarga dan perempuan menjadi ibu rumah tangga.

Sementara itu otonomi daerah belum mampu mengubah ketidakadilan perempuan. Orientasi berlebihan pemerintah kabupaten dan kota terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

mendorong upaya eksploitasi sumberdaya alam dan akhirnya berdampak pada marginalisasi kelompok miskin, termasuk kaum perempuan. Retribusi daerah dipacu, terutama untuk sektor perdagangan, pasar-pasar, lokalisasi, rumah makan dan hiburan. Banyak sektor usaha yang dilakukan PUK terkena dampaknya. Sayangnya, kontribusi pengusaha kecil-mikro yang sebagian besar perempuan tidak memperoleh imbalan proposional. Hal tersebut terlihat dari alokasi budget rata-rata pemerintah kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan yang hanya 20%, dimana tidak ada alokasi khusus untuk upaya pemberdayaan perempuan.

Berharap pada kemunculan kebijakan “affirmative action” dari pengambil kebijakan, seperti ibarat panggung jauh dari api. Karena hingga kini perspektif gender kalangan birokrasi dan legislatif masih memahami sebagai pendekatan jumlah kehadiran perempuan dalam kegiatan. Disisi lain, tekanan kelompok masyarakat, baik organisasi perempuan maupun organisasi masyarakat sipil belum efektif. Walaupun beberapa organisasi perempuan telah berupaya keras, namun hasilnya jauh dari harapan. Dalam hal ini peran JARPUK sebagai alternatif organisasi perempuan di level kabupaten, masih penting sebagai kekuatan sipil yang memantau semua kebijakan dan program pemerintah.

Laporan berikut merupakan gambaran kegiatan ASPPUK selama tahun 2009. Semua aktifitas diorientasikan untuk penguatan ekonomi-politik PUK untuk menanggulangi kemiskinan dan pemiskinan. Secara umum, kegiatan tersebut menjadi bagian *integral* demi terwujudnya *Perempuan usaha kecil-mikro (PUK-mikro) yang kuat dan mandiri dalam masyarakat sipil yang demokratis, sejahtera, egaliter, setara dan berkeadilan gender.*

Visi & Misi ASPPUK

Visi

Terwujudnya Perempuan usaha kecil-mikro (PUK-mikro) yang kuat dan mandiri dalam masyarakat sipil yang demokratis, sejahtera, egaliter, setara dan berkeadilan gender.

Misi

- Memfasilitasi terbangunnya gerakan PUK-mikro yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk mewujudkan sistem yang kondusif bagi proses demokratisasi.
- Memfasilitasi terbangunnya akses dan kontrol PUK-mikro terhadap sumberdaya ekonomi.

Dalam mewujudkan **Visi** dan mengemban **Misi**, ASPPUK berpegang pada nilai;

- Kesetaraan
- Keadilan
- Kebebasan
- Keterbukaan (*transparancy*).
- Keseimbangan; dan
- Anti kekerasan (*Non Violence*)

Program Pokok ASPPUK

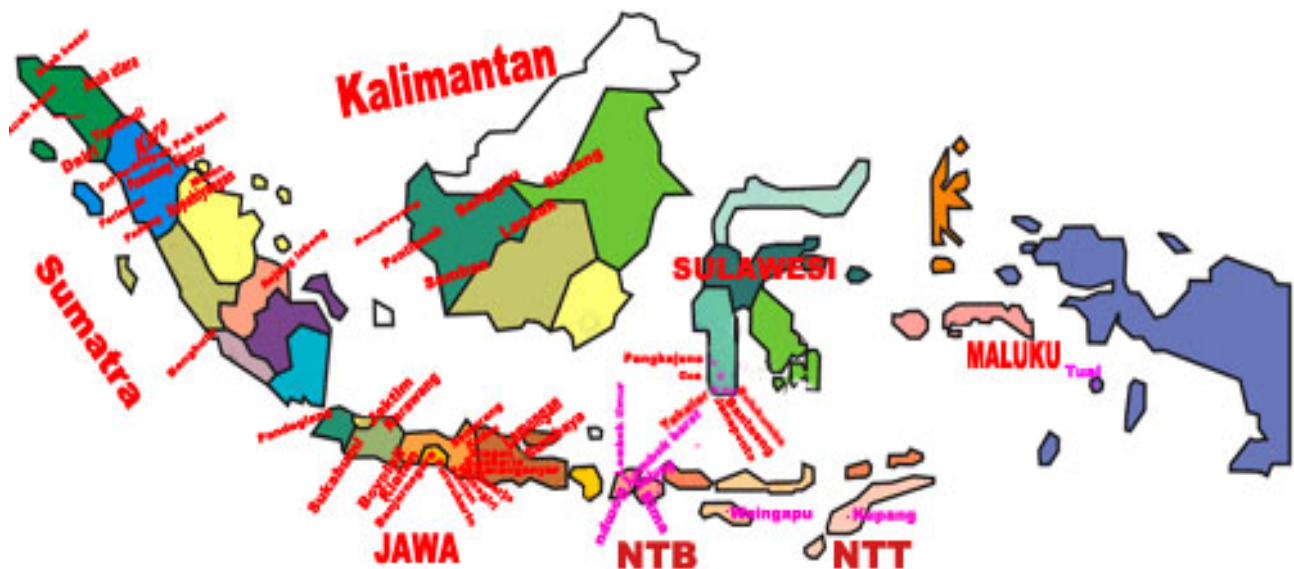
Secara garis besar, ASPPUK mempunyai lima program, yaitu; *pertama*, penguatan ornop anggota dalam advokasi, networking dan fund raising; *kedua*, penguatan PUK-mikro melalui pelatihan, studi banding, pelayanan usaha, workshop, networking antara mereka, dan sebagainya; *ketiga*, membangun dan menguatkan jaringan pasar bagi produk PUK-mikro; *keempat*, advokasi kebijakan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan PUK-mikro; *kelima*, networking; *keenam*, publikasi.

Dari enam program, kegiatan ASPPUK disusun sebagai upaya penguatan PUK-mikro. Semua kegiatan ASPPUK dilakukan melalui; *pertama*, dengan menggalang gerakan PUK-mikro di level *grassroot*; *kedua*, dengan melakukan perubahan kebijakan yang adil bagi PUK-mikro.

Kegiatan Pokok

- A. Memfasilitasi dan Menguatkan Anggota Asosiasi
- B. Penguatan Perempuan usaha kecil-mikro.
- C. Membangun dan menguatkan Jaringan Pasar bagi Produk PUK-mikro
- D. Advokasi Kebijakan
- E. Networking
- F. Publikasi

Peta Wilayah Anggota ASPPUK



Kegiatan Pokok

- A. Memfasilitasi dan Menguatkan Anggota Asosiasi

Penguatan anggota ASPPUK dilakukan dengan berbagai kegiatan, diantaranya;

A.1. Penguatan ASPPUK Wilayah dan Anggota Melalui Perluasan Akses Sumberdaya

Sesuai strategi desentralisasi yang dikembangkan ASPPUK, maka sebagaimana tahun sebelumnya, sekretariat nasional ASPPUK memfasilitasi dan membantu sekretariat ASPPUK wilayah dan anggota asosiasi untuk mengakses sumber daya demi keberlangsungan aktifitas di wilayah masing-masing. Diantara aktifitasnya adalah upaya dalam mengakses program pengembangan dan penguatan usaha PUK melalui NGO pendamping di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan Barat, Jawa dan Sumatera.

Namun begitu, harus diakui tidak semua wilayah mendapat fasilitas tersebut, terutama dalam pengaksesan sumber daya untuk pengembangan dan pemberdayaan PUK-mikro melalui NGO anggota. Dalam hal ini, ASPPUK wilayah Sumatera dan Sulawesi beserta NGO anggotanya belum mendapat kesempatan. Situasi ini menjadi refleksi sekretariat nasional ASPPUK untuk berusaha memfasilitasinya di tahun yang akan datang.

A.2. Penguatan Akuntabilitas NGO anggota Melalui Workshop Perumusan Kode Etik

Penyusunan kode etik ASPPUK didasari oleh peningkatan tuntutan akuntabilitas melalui upaya pengaturan diri (*self regulation*) demi peningkatann governance LSM. Hal itu didasar – salah satunya – oleh banyaknya anggota dan calon anggota asosiasi, namun mereka masih memiliki keterbatasan dalam pengaturan diri (*self regulation*) yang akuntable. Maka, sejak tahun 2006 ASPPUK memiliki agenda perbaikan governance, transparansi dan akuntabilitas yang dimulai dengan perumusan Kode Etik. Sayangnya instrumen tersebut belum memiliki mekanisme penegakan. Sehingga internalisasi dan implementasi kode etik di lembaga anggota tidak berjalan efektif. Pada Fornas ASPPUK 2008, MPO (Majelis Pertimbangan Organisasi) diamanatkan untuk merumuskan instrumen kode etik dengan referensi pedoman perilaku KPMM, TANGO, PCNC Philippines, Kode Etik LSM Indonesia. Setelah draft kode etik dirumuskan, MPO dengan dibantu seknas ASPPUK menyelenggarakan workshop guna mendiskusikan draft kode etik dan penyempurnaannya. Hasilnya menjadi acuan penegakan akuntabilitas kelembagaan ASPPUK secara nasional.

Workshop dilaksanakan selama 4 hari; tanggal 21 s/d 24 April 2009, di **Wisma Hijau**, Mekarsari Cimanggis, Depok, Jawa Barat dan diikuti sebanyak 2/3 NGO anggota ASPPUK, pengurus wilayah dan nasional ASPPUK, serta seknas nasional, yang berjumlah semuanya menjadi 40 peserta. Workshop terdiri dari; presentasi sejarah dan pembentukan kode etik ASPPUK, pembahasan draft kode etik ASPPUK, penyepakatan dan pengesahan kode etik.

Dari workshop, dihasilkan; *pertama*, penyesahan kode etik ASPPUK. *Kedua*, desetujuinya pasal non partisan, dimana dalam point ke empat, semua personil ASPPUK tidak diperbolehkan terlibat dalam pilkada dan legeslatif, TNI-polri, PNS dan kepala daerah. *Ketiga*, desetujuinya istilah “Ornop” sebagai pengganti istilah “LSM” bagi organisasi jaringan ASPPUK. *Keempat*, penegakan kode etik di tahun 2009 dilakukan dengan pengambilan sampel Ornop anggota ASPPUK.

A.3. Workshop Hasil Pemetaan Kode Etik ASPPUK

Pengesahan Kode Etik merupakan langkah maju ASPPUK sebagai jaringan masyarakat sipil nasional. Kode etik menjadi alat kontrol etik kelembagaan -- selain AD dan ART. Namun begitu, penegakan kode etik merupakan fenomena baru di ASPPUK. Langkah berikutnya, MPO dengan dibantu seknas ASPPUK memfasilitasi pengurus ASPPUK wilayah melakukan pemetaan penegakan akuntabilitas anggota, sebagai media sosialisasi kode etik dan internalisasi nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas OMS. Pemetaan dilakukan dengan mengambil sampel NGO anggota selama September dan Oktober 2009 yang menghasilkan kondisi riil NGO anggota. Diantara hasilnya; ada sejumlah pasal yang memerlukan reservasi karena situasi riil anggota, dan masukan pasal kode etik yang perlu diperbaharui untuk fornass ke depan.



Berdasarkan gambaran itu, ASPPUK melakukan workshop evaluasi terhadap hasil monitoring-pemetaan penerapan kode etik. Kegiatan bertujuan, *pertama*, merumuskan dan mendiskusikan hasil monitoring-pemetaan anggota ASPPUK di 5 Wilayah dan seknas ASPPUK berdasarkan standar minimal Kode Etik. *Kedua*, mengidentifikasi kendala-kendala penerapan kode Etik, dan rekomendasi penyempurnaan Kode Etik ASPPUK ke depan.

Workshop hasil monitoring-pemetaan Kode Etik ASPPUK, dilakukan tanggal 16 – 19 November 2009, bertempat di Wisma Hijau, Mekarsari, Cimanggis, Depok, dengan penanggung jawab MPO sebagai dewan etik dan dibantu sekretariat nasional ASPPUK.

Dari workshop diketahui, *pertama*, perlu perbaikan kode etik yang diajukan dalam fornass ASPPUK tahun 2011. Diantara pasal yang diusulkan; non partisan, ruang lingkup kode etik, monitoring, proses pemeriksaan dan sanksi, nama organisasi ASPPUK, rangkap jabatan, perangkat implementasi. *Kedua*, perlunya reservasi (penundaaan) 2 tahun di beberapa pasal sampai dirasa anggota siap dan layak untuk diterapkan. Diantaranya; pasal 16 ayat 3 dan 4 tentang *Non Partisan*, pasal 20 ayat 1 dan 2 tentang *Transparansi*, pasal 22 ayat 3 dan 4 tentang adanya kebijakan lembaga untuk pemenuhan Hak-hak reproduktif perempuan (cuti melahirkan dan cuti haid) dan bagi laki-laki untuk cuti SIAGA, dan jumlah perempuan dalam Badan-badan kelembagaan ASPPUK dan anggota sekurang-kurangnya 30 %. *Ketiga*, adanya kode etik menjadikan “Tanggo” melebur menjadi instrument kode etik. *Keempat*, MPO diamankan untuk membuat; tatacara implemementasi kode etik, pemetaan, penjajagan kesiapan penerapan kode etik terhadap pasal yang di reservasi, melihat struktur Kode etik supaya tidak tumpang tindih, membuat instrument penegakan kode etik, membuat kebijakan reservasi -termasuk Pasal-pasal yang dirservasi atau di berlakukan. *Kelima*, Kode Etik menjadi instrumen akreditasi kelembagaan, meskipun sejumlah pasal ditunda pelaksanaannya, setelah MPO membuat surat keputusannya. *Keenam*, MPO menjadi satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penegakan kode etik.

A.4. Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan dan Pendataan Usaha Bagi Pendamping PUK

Usaha kecil-mikro diyakini sebagai kekuatan ekonomi nasional, karena selain kontribusinya dalam menyumbangkan PDB (Produk Domestik Bruto) nasional, juga dalam penciptaan tenaga kerja. Data BPS 2005 menunjukkan bahwa PDB yang diciptakan UKM mencapai Rp. 1.480,0 atau 54,22 % dari jumlah PDB nasional. Angka tersebut berasal dari 44,69 juta unit UKM atau 99,99% dari total unit usaha nasional, dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 77,68 juta pekerja atau mencapai 99,77% nasional. Melihat fakta diatas, ASPPUK berusaha mendorong penguatan PUK dalam pengembangan usaha sekaligus pengembangan diri dan kelembagaannya. Untuk mencapai pendamping usaha yang profesional, ASPPUK melakukan peningkatan kapasitas pendamping, khususnya pengetahuan dan ketrampilan bisnisnya, yaitu melalui pelatihan kewirausahaan. Diharapkan pelatihan tersebut menjadi media penggalan potensi terpendam pendamping untuk ditularkan kepada PUK.



Namun begitu sebelum pelatihan kewirausahaan, pendamping PUK diharap bisa mengenali potensi usaha PUK melalui pendataan. Penggalan profil PUK potensial oleh pendamping dan pengurus JARPUK amat penting, karena dari sini diketahui peta usaha PUK dan produk-produknya. Sehingga penetrasi pasar dan menegemen yang dikembangkan untuk pengembangan usaha PUK ke depan makin membaik.

Menyadari hal tersebut, diadakan workshop simulasi penggunaan aplikasi database baru yang dikembangkan Seknas ASPPUK sebagai teknologi pengelolaan database PUK. Workshop pendataan tentang penggalan usaha dan produk potensial PUK, mendahului pelatihan kewirausahaan bagi pendamping PUK. Pelatihan pengembangan kewirausahaan dan pendataan PUK bertujuan; *pertama*, peningkatan pemahaman pendamping tentang peran penting database di setiap level jejaring ASPPUK. *Kedua*, pendamping memahami implementasi teknis terhadap software database baru ASPPUK. *Ketiga*, pendamping memiliki jiwa kewirausahaan guna memotivasi PUK. *Keempat*, pendamping memahami metodologi pendampingan PUK yang komprehensif dan inspiratif.

Pelatihan kewirausahaan difasilitasi Hartono, direktur Owabung Purbalingga, dan sosialisasi pendataan dipandu Sony (IT Manager PT Nettrain), dan Fajar (Divisi Statistik Kompas), serta dibantu Darmanto (divisi IT ASPPUK). Pelatihan dilakukan selama 4 (empat) hari tanggal 25 s/d 29 Mei 2009, dengan metode; pembelajaran kreatif, diskusi kelompok, permainan, belajar kesuksesan pengusaha lain, dsb. Pelatihan diadakan di Wisma Hijau,

Mekarsari Cimanggis, Depok Jawa Barat. Sementara peserta workshop adalah para pendamping PUK dan PUK dari 5 kabupaten/kota; di Kudus, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, kota Padang Sumatera barat, Kab. Sintang, Kab. Kubur Raya, Kab. Pontianak dan kota Pontianak, Kalimantan Barat, serta staf sekretariat nasional ASPPUK yang berjumlah 25 orang.

Setelah mengikuti workshop, peserta merasa yakin akan keberadaannya sebagai pendamping usaha PUK, mampu mengoperasikan soft ware data base yang berbasis web, sensitifitas bisnis mulai meningkat dengan beberapa tip yang terambil dari pengalaman langsung fasilitator yang mempunyai pengalaman praktis. Selain itu, ada penawaran produk PUK dari fasilitator yang juga direktur Owabung untuk memasarkannya di tempatnya, dan kesediannya untuk membantu dalam konsultasi bisnisnya secara online dan langsung.

B. Penguatan Perempuan Usaha Kecil-mikro (PUK-mikro)

B.1. Pendampingan PUK dan JARPUK



Penguatan PUK dan JARPUK dilakukan melalui pendampingan integratif dalam program ornop anggota. Aktifitas ini merupakan tanggung jawab ornop dan untuk kegiatan yang dilaksanakan bersama JARPUK, menjadi tanggungjawab ASPPUK wilayah. Pendampingan anggota kepada PUK diarahkan dalam peningkatan usaha (termasuk LKP sebagai sarana permodalan), pengembangan diri dan organisasi JARPUK. Hingga kini, pendampingan anggota dilakukan

dengan intensitas yang beragam. Untuk NGO yang memiliki dukungan program, pendampingan dilakukan secara intensif, sebagaimana terlihat di JARPUK wilayah Jawa, yakni; Solo, Sukoharjo, Klaten, Kudus, Bantul, Jabodetabek, Semarang, Banyumas, Sukabumi, Pandeglang. Begitupula di wilayah Sumatera Barat, yakni kota Padang dan Padang parimana, dan Kalimantan Barat, yakni; kota Pontianak, kab. Pontianak, kab. Kubur raya, Sintang, Sambas, dan Singkawang. Di wilayah tersebut perkembangan PUK bergerak naik, baik secara pribadi, usaha dan posisinya dalam masyarakat. JARPUK juga aktif dalam kegiatan advokasi, seperti di Solo, Kudus, Sambas, Klaten, Wonogiri yang mencermati anggaran pembangunan daerah, dan kab Sukoharjo yang mengadvokasi pembuatan PERDA (peraturan daerah) yang mendukung UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah).

Untuk wilayah lain, pendampingan pada aspek bisnis mengalami hambatan. Fasilitasi bisnis secara bersama sulit dilakukan karena heterogenitas usaha dan berskala mikro. Hal ini merupakan permasalahan lama ASPPUK, namun sulit teratasi karena keterbatasan kapasitas ornop dalam penyediaan staf pendamping. Pelatihan pendampingan yang dilakukan

ASPPUK tahun ini dirasakan manfaatnya, apalagi diperkuat dengan pendataan PUK yang sistematis.

Sebagaimana diinformasikan pada tahun lalu, di tahun ini ASPPUK terus mengembangkan model dan pelatihan pendampingan yang spesifik pada pengembangan PUK. Yaitu pendampingan integratif yang memiliki sensitivitas pengembangan bisnis dan responsif gender di 5 JarPUK di Kalimantan Barat, 3 JARPUK di Jawa Tengah dan JARPUK di Sumatera Barat, dengan dukungan Hivos.

B.2. Monitoring LKP

Dari pemantauan yang dilakukan Seknas dan Sekwil, secara umum perkembangan LKP cukup baik, dalam artian kegiatan simpan pinjam masih berjalan, dan memberikan kemanfaatan bagi anggota. Namun demikian perkembangannya tidak merata, terkait dengan faktor kemampuan pengelola maupun intensitas pendampingan NGO anggota. Selain itu, mereka mengirimkan laporan dua kali dalam satu tahun ke seknas ASPPUK.



Situasi LKP di sejumlah wilayah beragam, ada LKP mempunyai perkembangan stagnan, karena beberapa alasan seperti lesunya usaha anggota karena krisis global dan situasi lokal. Secara umum, tingkat kemacetan LKP masih ditoleransi, namun secara ekonomis perkembangan LKP belum menunjukkan hasil yang maksimal dari sisi perputaran modal. Hal itu terjadi karena; *pertama*, LKP memiliki keterbatasan kemampuan dalam strategi pemasaran dan pelayanan yang berorientasi profit. *Kedua*, LKP lebih berorientasi pada pemerataan layanan dan menjaga relasi/kebersamaan kelompok. *Ketiga*, kapasitas pengelola belum cukup memadai. *Keempat*, kehati-hatian pengurus LKP dalam penyaluran dan pengelolaan modal LKP, termasuk dalam penarikan tabungan anggota sehingga LKP mengalami kekuarangan likuiditas, dsb.

Berdasarkan hal itu ASPPUK berinisiatif mendorong LKP untuk membentuk organisasi payung di tingkat wilayah atau nasional. Organisasi ini diharapkan berfungsi untuk mengembangkan kapasitas dan menjaga stabilitas permodalan antar LKP di wilayahnya. Bentuk hukumnya adalah Koperasi simpan pinjam. Dengan adanya koperasi skunder di tingkat wilayah atau nasional diharapkan ASPPUK memiliki fokus perhatian keahlian dalam pengembangan keuangan mikro dengan perspektif gender. Memasuki tahun 2009, ada sejumlah LKP yang mulai mengangsur dana stimulan kepada ASPPUK sesuai perjanjian kerjasamanya. Angsuran tersebut akan digunakan ASPPUK untuk memfasilitasi pendirian LKP di tempat lain. Namun begitu, ada juga LKP yang meminta penjadwalan ulang dalam pengangsurannya, karena kondisi likuiditas LKP yang tidak memungkinkan.

Meskipun begitu, keberadaan LKP mempunyai makna berarti bagi PUK. LKP menjadi perekat dan dinamisator aktifitas JARPUK terutama dalam peningkatan ekonomi anggota. Gambaran diatas menunjukkan bahwa LKP memberikan dampak kesejahteraan bagi keluarga PUK. Hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung diperolehnya melalui akses terhadap layanan LKP. Dampak langsung misalnya melalui penggunaan dana LKP untuk meningkatkan usaha dan memperoleh peningkatan pendapatan sehingga mampu memberikan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Dalam konteks itu, dampak tidak langsungnya adalah kemampuan PUK dalam menyekolahkan anak-anaknya.

B.3. Refleksi dan Inisiasi Pendirian LKP Nasional

Untuk mengatasi masalah permodalan, sejak 1998 ASPPUK memiliki program “Kredit Mikro” (KM), yaitu layanan kredit yang disalurkan kepada KPUK melalui NGO pendamping. Pengalaman tersebut menjadi dasar ASPPUK dan JARPUK untuk mendirikan LKP, sebagai lembaga keuangan yang dimiliki PUK melalui JARPUK, dan didukung NGO pendamping dan ASPPUK dalam bentuk *share* modal. LKP memasuki tahun ke-6 di tahun 2009. Banyak pengalaman dan pelajaran yang dipetik LKP. Berbagai langkah telah dilakukan seknas ASPPUK – lembaga yang memfasilitasi pendiriannya – termasuk monitoring secara berkala hingga dilakukannya studi dampak terhadap LKP. Dari berbagai pengalaman LKP perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh, diantaranya; manajemen pengelolaan LKP, mekanisme pendirian, perbaikan sumberdaya pengelola, dan berbagai problem lain yang berkaitan dengan sistem dan mekanisme lembaga keuangan, termasuk inisiasi LKP nasional sebagai lembaga peningkat kapabilitas LKP dan pengaturan lalu lintas likuiditas LKP.

Untuk memotret perjalanan LKP, diperlukan refleksi dan rekomendasi yang tepat. Maka diadakan workshop sebagai forum untuk menyelesaikan berbagai problem diatas. Sehingga diharapkan workshop ini menjadi masukan penting bagi perjalanan LKP ke depan. Adapun tujuannya; pemetaan kondisi LKP yang dirintis JARPUK, sehingga tergambar potensi dan kelemahan LKP, tersusun dan disetujuinya perbaikan konsep LKP melalui proses partisipatif, transparan dan sesuai dengan visi dan misi ASPPUK dan JARPUK, diketahui dan dirumuskan peran dan fungsi yang berperan dalam LKP, termasuk inisiasi pendirian LKP nasional.



Workshop difasilitasi Dedy Heriyanto, *konsultan keuangan mikro FT Link Mandiri*, dan penulis buku „Lembaga Keuangan Perempuan: Konsep, Praktek dan Dampak”, Jakarta: ASPPUK, 2007, dan didukung narasumber, yaitu; Tjandra Irawan, *Micro Finance Consultant*, dari Yogyakarta, dan M. Firdaus, *Deputi SEN ASPPUK*. Sementara pesertanya adalah perwakilan pengurus LKP dari 5 Wilayah, beberapa pendamping LKP (Koordinator

Program atau Staf Pendamping), Sekretaris Eksekutif Wilayah (SEW) dari 5 Wilayah (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Nusatenggara) dan Komite Eksekutif Nasional (NT, Sumatera, Kalimantan), bertempat pada tanggal 6 – 10 Agustus 2009 dan bertempat di Wisma Hijau, Mekarsari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Proses workshop dimulai dengan masukan narasumber tentang keberlanjutan “*Lembaga Keuangan Mikro dan kemungkinan inisiasi pendirian lembaga keuangan mikro di tingkat nasional*”. Kemudian dipertajam dengan pemaparan temuan LKP oleh M.Firdaus dan diperkaya refleksi peserta tentang perjalanan LKP selama ini dalam kelompok-kelompok kecil dan pleno. Dari diskusi dihasilkan konsep LKP, yang mengatur secara komprehensif posisi ASPPUK, NGO pendamping, JARPUK dan peran masing-masing lembaga. Disepakati pula tentang syarat pendirian LKP dan kewajibannya (*silahkan lihat konsep LKP baru*). Workshop juga merekomendasikan seknas ASPPUK untuk mengawal proses ini dan menjadi capacity builder bagi terwujudnya LKP yang memberdayakan dan mensejahterakan PUK.

B.4. Fasilitasi Pengembangan Pasar



Pengembangan pasar merupakan salah satu kegiatan penting bagi JARPUK. Di 3 wilayah seperti Jawa Tengah (kota Solo, Kudus, dan Sukoharjo), Sumatera (kota Padang), dan Kalimantan Barat (Kota Pontianak, kab, Pontianak, Kubur Raya, Sambas, Sintang dan Singkawang) yang mendapat fasilitasi program kerjasama dengan Hivos, geliat pasar mulai tampak.

Konsultasi pasar oleh konsultan bisnis di 3 wilayah tersebut menjadi salah satu terobosan bagi penguatan produk-produk PUK. Kegiatan itu menambah wawasan dan menjadi masukan berharga untuk mencari alternatif pasar yang selama ini telah dilakukan. Pasar-pasar tradisional yang selama ini telah dibangun dipertahankan dan dicari alternatif pasar untuk mengembangkan produk-produk PUK.

Di wilayah Jawa, Jarpuk Ngudi Lestari Solo, telah mengikuti pameran dan memasarkan produknya (seperti Konveksi, Kuliner dan Handycraft) di pasar Malam Ngarsopuro, Solo. Di pasar tersebut Jarpuk mendapat 30 meja dari 90 tenda yang disediakan pengelola Pasar Ngarsopuro yang buka setiap malam minggu dan malam hari libur atau moment penting. Selain itu, mereka telah mengikuti pameran Solo Batik Karnival (bulan Juli 2009), kongres pertanian di Donohudan dan Java Expo (Juli), pameran dan festival kuliner diselenggarakan Disperindag Jateng pada tanggal 3-6 september 2009 di Disperindag Semarang, pameran dan bazar ini diselenggarakan PKK di Pemkot Solo, tanggal 27-29 November.

Sementara di Sukoharjo, anggota JARPUK mengikuti pameran produk makanan sehat yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Sukoharjo dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (29 Nopember), dan bazar yang diselenggarakan TMMD (TNI manunggal masuk Desa) di kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Hasilnya, 80 persen dagangan yang dijual di bazaar tersebut terjual. Sementara di Kudus, JARPUK mendapat stand untuk ikut pameran produk, seperti; jenang, kacang, keciput, rengginan ketan, rempeyek, keripik talas, gadung, menjelang lebaran yang disediakan kantor Perdagangan Kabupaten Kudus, tanggal 14-16 September 2009.

Sementara di Kalimantan Barat, KPUK di kab. Sambas bersama ibu-ibu Bhayangkari melakukan bazaar hasil produk kelompok di Pemangkat, 13 Agustus 2009, dan pada tanggal 15-16 Agustus 2009 melakukan promosi produk di Tebas, serta KPUK di Sintang dengan NGO pendamping mengikuti Pameran di Pontanak. Selain itu, pada bulan Juli-Agustus-September 2009, KPUK di kota Pontianak mengikuti pameran/bazaar, even di tingkat Propinsi Kalimantan Barat.

Kemudian di kota Padang, PUK anggota JARPUK mencoba untuk memfasilitasi pengembangan pemasaran produk-produk unggulan PUK dengan memperkenalkannya kepada pemilik trading house/pengusaha seperti toko Christine Hakim dan Citra Swalayan Group, yang terkenal di kota Padang. Adapun produk yang diterima di situ adalah Wajik bandung, macho badarai, kue pia dan kue kering lainnya. Sedangkan produk PUK yang dipasarkan Citra Swalayan Group adalah kue kering dan basah (wajik padang dan wajik bandung). Mereka merencanakan untuk membuat katalog/profil JARPUK sebagai bahan untuk lobi dengan pihak PT Semen dan trading house Tuah Sakato (Pemda) serta pihak trading house lainnya.

Sementara di tingkat nasional, fasilitasi pasar dilakukan dengan dua model; melalui promosi elektronik dan melakukan display produk di sekretariat, serta memfasilitasi penjualan/pengiriman produk PUK antar wilayah. Tidak seperti tahun 2008, meskipun tidak terlalu banyak, namun penjualan produk mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2009 mengalami stagnan, karena sejumlah problem internal.

B.5. Peningkatan Kapasitas Usaha PUK-mikro

Untuk meningkatkan kemampuan pengembangan usaha, ASPPUK melalui NGO pendamping yang dipromosikan menjadi BDS (business devalopment services) melakukan sejumlah aktifitas, seperti; pelatihan, krusus singkat mengenai pembukuan, belajar bersama produk-produk baru, kunjungan antar PUK untuk belajar produk, dsb. Upaya peningkatan kemampuan PUK dilakukan baik atas prakarsa murni ASPPUK dan NGO pendamping, maupun inisiatif JARPUK dan pendamping untuk mengakses pelatihan yang diselenggarakan pemda pihak-pihak swasta.

Selama tahun 2009, PUK anggota JARPUK Solo terlibat di berbagai aktifitas, yaitu; pelatihan pernak-pernik (Pembuatan aneka macam kerajinan payet) yang difasilitasi Disperindag Surakarta, Desain Kemasan yang diadakan Disperindagkop Propinsi, pelatihan aneka kripik dan peralatan yang diadakan Disnaker, pelatihan tata boga/kuliner yang difasilitasi Dinkop Jateng, Pelatihan Motivasi Usaha yang difasilitasi Disperindag, Pelatihan Design Warna

Alam & alat yang difasilitasi Desperindag Provinsi, dsb. Sementara di Sukoharjo di kecamatan Bendosari sebanyak 15 orang anggota Jarpuk bermitra dengan Jarpeto (Jaringan Petani Organik) dan pembuatan minyak/kecap wijen. Selain itu anggota PUK bekerjasama dengan PKK melakukan pelatihan pembuatan kue kering dan jamu instan. Hasilnya dipasarkan dilingkungan sekitarnya, tempat kerja, dan 30 PUK (20 dari Mojolaban dan 10 dari Polokarto) mengikuti magang proses pembuatan batik di kabupaten Sragen, dsb.

Sementara di wilayah Kalimantan, berbagai aktifitas dilakukan seperti; pelatihan manajemen usaha untuk Puk, pelatihan desain dan pengembangan produk kerajinan tenun ikat di Sintang, Pertemuan forum usaha, 2 orang PUK mendaftarkan perijinan untuk Halal (2 org), Pelatihan Perencanaan produksi dan Kontrol Kualitas untuk produk anyaman rotan di Toho, Pelatihan Pembukuan sederhana di Toho dan di Rasau. Kemudian di wilayah kota Padang, diantaranya; Pembukuan Usaha dan Koperasi yang diikuti 24 PUK, Pelatihan motivasi, manajemen perencanaan, Training Pembukuan Usaha untuk PUK, TOF POD untuk PUK.

Peningkatan kapasitas PUK dalam mengelola usaha juga dilakukan dalam pertemuan rutin yang rata-rata minimal 1 x 1 bulan. Agenda yang dibahas dalam pertemuan antara lain sharing perkembangan usaha masing-masing PUK, kendala yang dihadapi dan mendiskusikan bersama pemecahan masalahnya, asistensi pembukuan seperti pencatatan transaksi harian, neraca dan laporan rugi laba dan pembuatan dan penyempurnaan perencanaan usaha. Disamping itu dilakukan kunjungan langsung ke PUK potensial.

B.6. Advokasi Kebijakan di Tingkat Kabupaten

Selain pengembangan usaha PUK, JARPUK sebagai organisasi massa juga mendorong terwujudnya hak-hak PUK sebagai warga negara. Dua tujuan itulah yang menjadi pilar dasar pembentukan JARPUK. Selama tahun 2009, JARPUK telah berusaha untuk membantu anggotanya dengan melakukan aktifitas advokasi demi tercapainya hak-hak PUK dan pengembangan usaha.

Gambaran itu terlihat di kota Solo dimana KPUK Bina Mandiri yang baru menjadi anggota JARPUK solo mengalami penggusuran di wilayah usahanya. Penggusuran ini terjadi karena di tingkat pemkot Solo melakukan penataan kota, sehingga beberapa pedagang kaki lima yang menempati lahannya menjadi tergusur. Upaya JARPUK Ngudi Lestari adalah dengan melakukan lobby agar mendapatkan ganti rugi yang layak sekaligus mendapatkan penggantian tempat untuk usaha yang strategis. Selain itu, JARPUK juga memfasilitasi kelompok Bina Mandiri sebagai pedagang dari Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) untuk berjejaring membangun kekuatan dengan kelompok lain agar punya posisi tawar dengan Pemkot dan pengelola. Dalam hal itu, seorang anggota kelompok, **Utami**, menyatakan “ *Dari Maket yang pernah dilihatkan ke kita nantinya TSTJ akan dibangun dengan megah dan ada supermarket di situ, ini menjadi ancaman bagi kami. Disamping itu penataan juga memungkinkan adanya penggusuran,*”.

Sementara itu, di kab kudus, anggota KPUK yang berdagang di sekitar menara mengalami ketidakadilan dalam tata ruang sehingga menyebabkan kerugian omsetnya. Menurutny kerugian pedagang di sekitar menara dan terminal lama terjadi karena terminal telah dipindahkan sehingga pelanggan tidak berjalan melalui tempat usahanya yang otomatis

menurunkan pelanggannya. Dalam konteks itu, pernah ada pertemuan antara pengurus JARPUK dan pendamping serta elemen lain untuk mengadvokasi persoalan tersebut. Hasilnya, JARPUK telah melakukan advokasi perpindahan terminal, tapi tetap hingga kini belum mempunyai hasil. Dalam hal ini, dinas perhubungan merupakan kunci penyelesaiannya, karena ia bisa mengarahkan para penjalan kaki untuk bisa melewati terminal dimana pedagang berada di situ, belum berpihak kepada KPUK.

Kemudian, di Sukoharjo berkat peran dan kerja advokasi JARPUK, kini ia telah menjadi langganan dinas-dinas dalam implementasi program pemerintah, dan ada alokasi APBD sebesar 7 juta untuk program yang dijalankan JARPUK untuk tahun 2009, termasuk diantaranya penyewaan sekretariat JARPUK. Di kota Padang, meskipun tidak seintensif di wilayah Jawa, namun upaya membangun jaringan dengan elemen lain tetap dilakukan. Memang untuk tahun 2009, pertemuan Jarpuk dengan oms lain untuk melakukan advokasi belum dilakukan. Saat ini aktivitas yang dilakukan lebih pada pembenahan internal KPUK, Jarpuk dan LKP serta pengembangan usaha PUK apalagi ada bencana gempa bumi di tahun 2009.

Kemudian, di kab Lombok Tengah, semenjak Agustus 2009, beberapa KPUK hingga JARPUK berusaha mempengaruhi kebijakan dan peng-anggaran daerah yang berpihak pada perempuan miskin dan kelompok marjinal yang tergabung dalam KPUK. Kegiatan dilakukan secara sistematis mulai dari KPUK di tingkat grass root pada pemerintah kelurahan hingga kabupaten untuk memantau kebijakan yang lebih berpihak kepada perempuan miskin di LombokTengah. Hingga tahun 2009, out put kebijakan daerah yang diadvokasi belum terlihat, dan hasilnya akan tergambar pada tahun 2010.

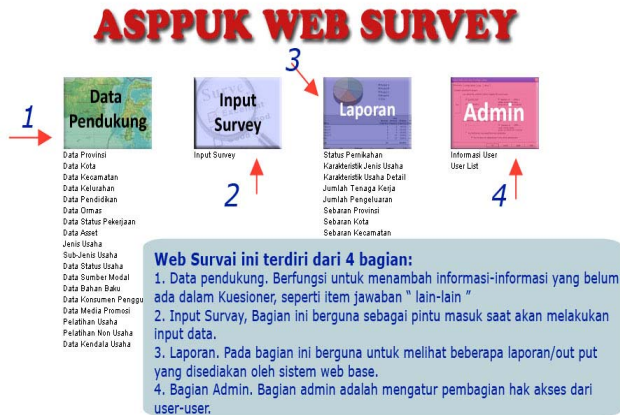
C. Publikasi

C.1. Berita PUK-mikro melalui Website

Keberadaan teknologi website tidak dipungkiri peranannya sebagai salah satu alat organisasi untuk melakukan penyebaran informasi. ASPPUK secara perlahan dan pasti terus mencoba menata system informasi, salah satunya dengan teknologi website. Melalui website berita-berita PUK dengan cepat dibaca khalayak luas khususnya anggota ASPPUK sendiri.

Pengembangan website ASPPUK (www.asppuk.or.id) kini didorong kearah website e-commerce yang menyajikan kumpulan produk PUK berbagai wilayah ASPPUK. Sehingga diharapkan website ASPPUK menjadi etalase produk PUK di seluruh wilayah ASPPUK. Salah satu upaya untuk mendorong aktivitas ini, diantaranya wilayah Jawa memiliki situs website (www.asppukjawa.org) sebagai media anggota ASPPUK Jawa untuk berbagi informasi dan penyajian produk PUK.





Selain itu e-commerce website ASPPUK juga dikembangkan sebagai penyedia data perkembangan PUK. Untuk mewujudkan langkah ini, ASPPUK membuat Web Base Survey dengan domain www.asppuk.org (pertengahan 2009). Melalui web base survey diharapkan ASPPUK dan jejaringnya dapat memanfaatkan web base sebagai pusat informasi data PUK, sehingga mendorong proses pertukaran informasi di kalangan PUK.

D. Advokasi dan Networking

D.1. Tingkat JarpuK; Pengembangan Aliansi JarpuK

Pada tingkat kabupaten, JarPUK sebagai bagian masyarakat sipil tetap memelihara hubungan dengan komponen lain. Hal itu menjadi bagian aktifitas JARPUK yang tak terpisahkan, karena disadari tak mungkin menyuarakan hak-hak PUK tanpa beraliansi. Aktifitas tersebut yang terus didokumentasikan seknas ASPPUK dan disebarluaskan kepada JARPUK di tempat lain. Namun begitu, mobilisasi aliansi antar JARPUK di tingkat nasional, di tahun 2009 belum menjadi prioritas, karena beberapa kendala keterbatasan dana dan maraknya isu pada tingkat kabupaten sehingga energi JARPUK tercurahkan pada tingkat lokal. Selain itu, issue nasional seperti terjadi pada tahun sebelumnya – seperti kenaikan BBM, kenaikan tarif listrik dsb – tidak mengemuka di tahun 2009.

Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan di tahun 2010 untuk terjadi kolaborasi antara ASPPUK dan JARPUK untuk mengusung issue nasional.

D.2. Tingkat Nasional

Sementara pada tingkat nasional, aktifitas advokasi dan jaringan banyak dilakukan ASPPUK khususnya sekretariat nasional, seperti;

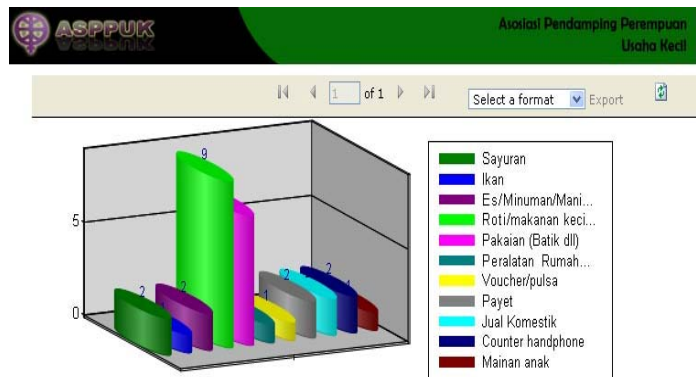
1. Keterlibatannya sekretariat nasional dalam pengkritisan RAPBN 2010, yang beserta masyarakat sipil lainnya melakukan analisis anggaran nasional pada bulan November 2009.
2. Aktif dan berpartisipasi dalam advokasi masyarakat sipil untuk pencapaian MDGs (Millenium Development Goals). Dalam hal itu, ASPPUK juga menjadi anggota aktif dalam Koalisi masyarakat sipil untuk MDGs.
3. Secara aktif, ASPPUK terlibat dalam *E-net fo Justice (Education Network)*, yaitu jaringan nasional yang memperjuangkan pendidikan untuk keadilan di Indonesia. Dalam hal itu, ASPPUK terlihat aktif untuk mengkritisi sistem pendidikan Indonesia yang sudah mengarah kepada “komersialiasi” sebagai efek dari “privatisasi” negara.

E. Pengembangan Kapasitas Lembaga

E.1. Website Maintenance dan Pengembangan Data Base

Di tahun 2009, ASPPUK berusaha mengembangkan website lebih maju dari sebelumnya. Salah satunya penyiapan konten yang mendukung pada teknologi web yang berbasis e-commerce. Namun kendalanya adalah belum konsistennya jejaring ASPPUK untuk menyediakan informasi produk (foto, harga produk, dan deskripsi produk). Solusinya seknas ASPPUK mendorong untuk mengefektifkan kegiatan pendataan yang meliputi profil PUK, khususnya produk-produk PUK.

Pendataan PUK dilakukan ASPPUK sejak tahun 2003. Namun pendataan ini masih dilakukan secara manual, sehingga masih terpusat pada Seknas Nasional ASPPUK dan sulit mendapatkan update data dari wilayah. Menyadari hal ini ASPPUK pada 2009 mengembangkan system pendataan PUK secara On line. Diharapkan anggota ASPPUK mampu memperbaharui data PUK dari wilayah masing-masing,



sehingga tidak bergantung pada Seknas. Adanya system on line juga dimaksudkan untuk mengurangi biaya operasional kegiatan pendataan. Teknologi itu dikembangkan ASPPUK dengan sejumlah NGO anggota secara swadaya bekerjasama dengan PT. Netrain (salah satu penyedia jasa pengembangan program ICT). Pendataan berbasis web site, menguntungkan seknas, sekwil, NGO pendamping, JARPUK dan juga LKP, sehingga pengetahuan tentang profil setiap anggota JARPUK mudah diketahui dengan baik.

Namun sayang, teknologi web base masih belum menyeluruh pemanfaatannya, karena belum ada sosialisasi dan pelatihan yang kontinue. Pada tahun 2009 baru sekali dilakukan sosialisasi mengenai keberadaan web base survey, tetapi belum dilakukan pelatihan teknis khusus.

Selain itu, beberapa kendala penggunaan web base masih terjadi, seperti terbatasnya infrastruktur komputer dan jaringan internet di wilayah, karena sebagian besar wilayah ASPPUK berada di pedesaan. Sementara itu, seknas menyediakan secara fokus tenaga IT yang menaungi bidang ICT, sehingga menghambatnya dalam mengawal, mengembangkan, dan memelihara website yang berbasis data dan e-commerce. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengembangan data base seperti ini adalah koneksi internet dan kemampuan kader JARPUK yang berhasahabat dengan penggunaan internet. Meskipun berat di awal pengoperasiannya, namun lambat laun kader jarpuk dan NGO pendamping akan familiar untuk memperbaiki pendataannya.

E.2. Monitoring JARPUK

Monitoring secara teratur dilakukan ASPPUK (baik melalui seknas maupun sekwil) setiap 6 bulan. Sebelum monitoring dilakukan, setiap sekwil (di dalam laporan fowrwilnya) melaporkan kegiatannya yang ditembuskan ke seknas ASPPUK. Dari laporan tersebut, perkembangan LKP dan JARPUK secara tertulis terlihat. Disamping itu, monitoring juga dilakukan Komite eksekutif Nasional dan ASPPUK wilayah – dalam setiap forum wilayah -- setiap satu tahun sekali.

Hasil monitoring terlihat bahwa LKP dan JARPUK terus melakukan pembenahan dan LKP memiliki potensi besar sebagai penguatan ekonomi. Untukantisipasi dan mengatasi masalah diatas - ASPPUK di tahun 2009 ini melakukan refleksi dan memperbaharui secara tertulis menerbitkan panduan konsep LKP untuk dibagikan kepada NGO anggota.

E.3. Monitoring Ornop Anggota

Monitoring seknas ASPPUK kepada NGO anggota dan JARPUK dilakukan setiap tahun. Dalam melakukan monitoring, seknas dibantu sekretaris wilayah maupun Komite Eksekutif Wilayah. Monitoring khususnya untuk melihat keaktifan anggota dalam pendampingan PUK, dan untuk memantau kelanjutan program nasional. Di tahun 2009, monitoring juga dilakukan bersamaan dengan implementasi kode etik di beberap wilayah bersama MPO.

Hasilnya diketahui bahwa anggota yang kurang aktif belum menunjukkan perkembangan, oleh karenanya (di wilayah NT dan Jawa) mereka mendapatkan perngatan saat FNLB. Selain itu di wilayah Sulawesi juga terjadi penurunan aktifitas, karena beberapa sebab. Selain karena minimnya jumlah anggota juga ada pengurus yang kini sudah aktif di legeslatif daerah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pengurus untuk mengavaluasinya. Selain itu, di wilayah Sumatera, terjadi pergantian sekertaris eksekutif wilayah (SEW), karena pengurus SEW sebelumnya menjadi SEN di tingkat nasional.

E.4. Perbaikan dan Pengembangan Konsep LKP

Seknas dimanakan untuk menjaga dan bertanggung jawab atas keberlangsungan LKP yang berdasarkan pengalaman dari LKP kabupaten. Berdasarkan refleksi nasional tentang penerapan LKP di 18 kabupaten/kota di Indonesia, seknas diberi wewenang untuk menindakalnjuti rekomendasi wokrshop nasional tersebut.

Selama tahun 2009, seknas atas dasar rekomendasi tersebut melakukan pembenahan konsep LKP dan diajukan kembali pada *meeting* pengurus dengan KEN di akhir november 2009. Diantara hasil pembenahan tersebut adalah; seknas ASPPUK dipromosikan untuk menjadi LKP nasional yang bertugas sebagai *service provider* bagi LKP-LKP daerah, seknas diminta juga untuk memfasilitas kemungkinan berdirinya LKP skunder baik di tingkat nasional atau wilayah, dan beberapa kebijakan lain (*lihat konsep LKP perbaikan*).

E.5. Konsolidasi Internal Melalui FNLB

Bulan Februari 2009 merupakan tahun mendung bagi keluarga besar ASPPUK, karena telah dipanggilnya Yuni Prisiwati, SEN periode 2008 – 2011 ke hadirat Tuhan YME. Dengan cepat, KEN – melalui rapat internal – menunjuk M.Firdaus, sebagai PJS (pajabat sementara SEN) hingga dilangsungkannya FNLB (forum nasional luar biasa). Dalam hal itu, KEN menunjuk PJs untuk melaksanakan Forum Nasional Luar Biasa dalam waktu singkat.

Setelah dua bulan persiapan, dan dukungan penuh dari sebagian besar NGO anggota pada tanggal 21-24 April 2009 FNLB berhasil dilakukan di **Wisma Hijau**, Mekarsari Cimanggis, Depok Jawa Barat. FNLB 2009 diikuti lebih dari 2/3 NGO anggota, staf seknas ASPPUK dan perwakilan lembaga donor (yang diundang sebagai pengamat). Dari FNLB, dihasilkan disempurnakan dan disepakatinya kode etik ASPPUK oleh anggota ASPPUK sebagai alat untuk melakukan akreditasi, terumuskannya peroblem mendasar kelembagaan ASPPUK untuk penyempurnaan landasarn hukum jaringan di dalam AD/ART, adanya penyempurnaan arah kebijakan dan program ASPPUK seperti yang ada dalam AD dan ART serta dokumen strategic planning lainnya, dan terpilihnya sekertaris eksekutif nasional ASPPUK dan deputinya secara demokratis untuk menjalankan organisasi ASPPUK untuk periode 2009 – 2011.



F. Jaringan Kerja

Berikut ini, mitra dan jaringan kerja ASPPUK;

TDH	Terre Dos Home, Belanda
Hivos	Belanda
Ford Foundation	Amerika Serikat
OXFAM-Australia	Australia
Acces	Australia
Pokja Akuntabilitas	Kelompok kerja untuk peningkatan akuntabilitas LSM
Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Pencapaian MDGs	
JANPUKM	Jaringan nasional Pengembangan Usaha Kecil-Menengah
E-net For Justice Indonesia	Jaringan Pendidikan untuk Keadilan

Penutup

Sejumlah tantangan menunggu ASPPUK di tahun 2010. CA-FTA atau perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan China merupakan salah satu hajatan besar yang

harus dihadapi di awal tahun 2010. Untuk itu, ASPPUK dengan segala potensi dan kekurangannya, perlu merapatkan barisan dan beraliansi strategis dengan JARPUK untuk menghadapi segala kemungkin tersebut. Semoga tahun 2009 yang telah dilampau menambah amunisi untuk belajar menyongsong tahun depan yang penuh tantangan. Amin.

Laporan Keuangan

ASOSIASI PENDAMPING PEREMPUAN USAHA KECIL (ASPPUK) Neraca Per 31 Desember 2009 (Dalam Rupiah)	
AKTIVA	
AKTIVA LANCAR	
Kas dan setara kas	1,516,895,077
Piutang Kredit Mikro	305,651,800
Piutang ASPPUK Wilayah (LKP)	1,194,941,250
Piutang Karyawan	3,599,035
Uang Muka	162,861,531
JUMLAH AKTIVA LANCAR	3,183,948,693
AKTIVA TIDAK LANCAR	
Harga Perolehan	186,184,700
Akumulasi Penyusutan	(164,329,804)
Nilai Buku	21,854,896
JUMLAH AKTIVA	3,205,803,589
KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH	
KEWAJIBAN	
Hutang Donor	101,783,975
Hutang Tabungan Solidaritas	28,985,755
Hutang Pada Lembaga Lain	264,708,825
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	7,829,760
Jumlah Kewajiban	403,308,315
AKTIVA BERSIH	
Aktiva Bersih Awal Tahun	2,688,266,673
Perubahan Aktiva Bersih	114,228,601
Jumlah Aktiva Bersih	2,802,495,274
JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH	3,205,803,589